



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jend. Ahmad Yani kavling 58 (bypass) Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat

Website: <https://badilum.mahkamahagung.go.id/>

Jakarta, 20 Januari 2023

Nomor : 113/DJU.2/PP.00.4/1/2023  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Secara *Online* (daring) Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023

Yth. : 1. Para Hakim Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara;  
2. Para Hakim Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat;

Sehubungan akan diselenggarakannya Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Secara *Online* (daring) di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023, dimohon Bapak/Ibu/Saudara untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Secara *Online* (daring) Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 akan dilaksanakan pada tanggal **25 Januari s.d 27 Januari 2023**.
2. **Konfirmasi kehadiran dan registrasi** peserta paling lambat **hari selasa tanggal 24 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB** dengan melakukan registrasi melalui : <https://bit.ly/m/RJONLINE2023> . Hal-hal lainnya yang belum jelas dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 – Bypass Cempaka Putih Timur – Jakarta Pusat Telp (021) 29079176 pswt 1511.  
*Contact Person* : HP. 08161427335 (M.Rifa'i), 085782479899 (Tietie)  
Email: [pengembanganbadilum@gmail.com](mailto:pengembanganbadilum@gmail.com)

Atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara/i diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  
DIREKTUR  
Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

  
Dr. LUCAS PRAKOSO., S.H., M. Hum



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

**NOMOR : 86/DJU/SK/PP.00.4/1/2023  
TENTANG**

**PENUNJUKAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA BERBASIS  
KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) SECARA *ONLINE* (DARING)  
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemantapan pelaksanaan tugas Pengadilan serta mewujudkan kemampuan di bidang yudisial maka diperlukan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif secara *Online* (daring) di lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk itu perlu menunjuk para peserta Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif yang namanya tercantum dalam Keputusan ini untuk mengikuti Bimbingan Teknis dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak - Hak Sipil dan Politik);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012;
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
10. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
11. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;

15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
16. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
17. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
18. Surat Edaran Bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia, dan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08HM.03.02tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
19. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pembentukan TIM Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Nomor 170/SEK/SK/III/2018;
20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2023, Nomor: SP DIPA-005.03.1.097450/2023 tanggal 30 November 2022;
21. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 55/PA/SK/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2023.

### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF SECARA *ONLINE* (DARING) DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.
- KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk mengikuti Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) secara *Online* (daring) di lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2023 Pada tanggal **25 Januari 2023 s.d 27 Januari 2023** (Jadwal Terlampir) .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 17 Januari 2023

Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum



H. Bambang Myanto., S.H., M.H.

**KEPUTUSAN** ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
 NOMOR : 87/DJU/SK/PP.00.4/1/2023  
 TANGGAL : 17 Januari 2023

DAFTAR PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS  
 PENANGANAN PERKARA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*)  
 SECARA ONLINE (DARING) DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN UMUM

NO.	NAMA	GOL/ RG	JABATAN	L/P	SATKER
1	2	3	4	5	6
1	FREDRIK WILLEM SALJA, S.H., M.H. NIP. 19590204 198503 1 004	IV/e	KETUA PT KALIMANTAN UTARA	L	PT KALIMANTAN UTARA
2	SUTAJI, S.H., M.H. NIP. 19630223 198803 1 001	IV/e	WAKIL KETUA PT KALIMANTAN UTARA	L	PT KALIMANTAN UTARA
3	BOKO, S.H., M.H. NIP. 19630523 199212 1 001	IV/d	HAKIM PT KALIMANTAN UTARA	L	PT KALIMANTAN UTARA
4	Dr. ALFON, S.H.,M.H. NIP. 19630301 199212 1 001	IV/d	HAKIM PT KALIMANTAN UTARA	L	PT KALIMANTAN UTARA
5	MANGAPUL MANALU, S.H.,M.H. NIP. 19631208 199212 1 001	IV/d	HAKIM PT KALIMANTAN UTARA	L	PT KALIMANTAN UTARA
6	Dr. Hj. NIRWANA, S.H., M.Hum. NIP. 19620512 198803 2 005	IV/e	KETUA PT SULAWESI BARAT	P	PT SULAWESI BARAT
7	ABDUL HALIM AMRAN, S.H., M.H. NIP. 19621209 198803 1 001	IV/e	WAKIL KETUA PT SULAWESI BARAT	L	PT SULAWESI BARAT
8	BAMBANG NURCAHYONO, S.H., M.Hum. NIP. 19650812 199203 1 004	IV/d	HAKIM PT SULAWESI BARAT	L	PT SULAWESI BARAT
9	SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum. NIP. 19650308 199212 1 001	IV/d	HAKIM PT SULAWESI BARAT	L	PT SULAWESI BARAT
10	ACHMAD SYARIPUDIN, S.H., M.H. NIP. 19690325 199603 1 001	IV/c	KETUA PN TARAKAN	L	PT KALIMANTAN UTARA
11	ABDUL RAHMAN TALIB, S.H. NIP. 19770822 200904 1 001	III/d	HAKIM PN TARAKAN	L	PT KALIMANTAN UTARA
12	IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H. NIP. 19840421 200904 1 004	III/d	HAKIM PN TARAKAN	L	PT KALIMANTAN UTARA
13	ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H. NIP. 19810121 200912 1 002	III/d	HAKIM PN TARAKAN	L	PT KALIMANTAN UTARA
14	HERDIYANTO SUTANTYO, S.H., M.H. NIP. 19790923 200212 1 003	IV/a	KETUA PN NUNUKAN	L	PT KALIMANTAN UTARA
15	NARDON SIANTURI, S.H. NIP. 19900610 201712 1 005	III/b	HAKIM PN NUNUKAN	L	PT KALIMANTAN UTARA
16	DANIEL BELTZAR, S.H. NIP. 19911206 201712 1 003	III/b	HAKIM PN NUNUKAN	L	PT KALIMANTAN UTARA
17	BIMO PUTRO SEJATI, S.H. NIP. 19931114 201712 1 001	III/b	HAKIM PN NUNUKAN	L	PT KALIMANTAN UTARA
18	TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H. NIP. 19770913 200312 1 001	IV/a	KETUA PN MALINAU	L	PT KALIMANTAN UTARA
19	BUDI SANTOSO, S.H. NIP. 19751118 200604 1 001	IV/a	HAKIM PN MALINAU	L	PT KALIMANTAN UTARA
20	BRILLIAN HADI WAHYU PRATAMA, S.H., M.H. NIP. 19941117 201712 1 004	III/b	HAKIM PN MALINAU	L	PT KALIMANTAN UTARA
21	ZOU GEMILANG CONSUELO GULTOM, S.H., M.H. NIP. 19860420 201712 1 001	III/b	HAKIM PN MALINAU	L	PT KALIMANTAN UTARA
22	AHMAD THIB FARIS, S.H., M.H.Kes. NIP. 19900819 201712 1 002	III/b	HAKIM PN MALINAU	L	PT KALIMANTAN UTARA

23	JAN OKTAVIANUS, S.H.,M.H. NIP. 19741002 200012 1 002	IV/b	KETUA PN TANJUNG SELOR	L	PT KALIMANTAN UTARA
24	BUDI HERMANTO, S.H., M.H. NIP. 19751205 200212 1 004	IV/a	WAKIL KETUA PN TANJUNG SELOR	L	PT KALIMANTAN UTARA
25	CHRISTOFER, S.H. NIP. 19851228 201712 1 001	III/b	HAKIM PN TANJUNG SELOR	L	PT KALIMANTAN UTARA
26	FAJAR NURIAWAN, S.H., M.H. NIP. 19881126 201712 1 001	III/b	HAKIM PN TANJUNG SELOR	L	PT KALIMANTAN UTARA
27	BUDIANSYAH, S.H., M.H. NIP. 19660312 199603 1 002	IV/c	KETUA PN MAMUJU	L	PT SULAWESI BARAT
28	H. MASLIKAN, S.H. NIP. 19701004 199103 1 004	IV/c	WAKIL KETUA PN MAMUJU	L	PT SULAWESI BARAT
29	RAHID PAMINGKAS, S.H. NIP. 19771101 200212 1 001	IV/a	HAKIM PN MAMUJU	L	PT SULAWESI BARAT
30	IGNATIUS YULYANTO ARI WIBOWO, S.H. NIP. 19800719 200502 1 001	IV/a	HAKIM PN MAMUJU	L	PT SULAWESI BARAT
31	ROISUL ULUM, S.H., M.H. NIP. 19770524 200604 1 004	IV/a	KETUA PN MAJENE	L	PT SULAWESI BARAT
32	RASALHAQUE RAMADAN PUTRA, S.H., M.H. NIP. 19940312 201712 1 006	III/b	HAKIM PN MAJENE	L	PT SULAWESI BARAT
33	RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H. NIP. 19910911 201712 1 003	III/b	HAKIM PN MAJENE	L	PT SULAWESI BARAT
34	BAMBANG SUPRIYONO, S.H. NIP. 19790813 200212 1 007	IV/a	KETUA PN POLEWALI	L	PT SULAWESI BARAT
35	HARYOSENSO JATI NUGROHO, S.H. NIP. 19940323 201712 1 002	III/b	HAKIM PN POLEWALI	L	PT SULAWESI BARAT
36	FACHRIANTO HANIEF, S.H.,M.H. NIP. 19921018 201712 1 004	III/b	HAKIM PN POLEWALI	L	PT SULAWESI BARAT
37	I KETUT DARPAWAN, S.H. NIP. 19800524 200312 1 001	IV/a	KETUA PN PASANGKAYU	L	PT SULAWESI BARAT
38	ADHE APRIYANTO, S.H. NIP. 19900425 201712 1 005	III/b	HAKIM PN PASANGKAYU	L	PT SULAWESI BARAT
39	SIGIT YUDOYONO, S.H. NIP. 19861120 201712 1 001	III/b	HAKIM PN PASANGKAYU	L	PT SULAWESI BARAT
40	HERWINDIYO DEWANTO, S.H. NIP. 19930803 201712 1 008	III/b	HAKIM PN PASANGKAYU	L	PT SULAWESI BARAT



Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

H. Bambang Myanto, SH., MH

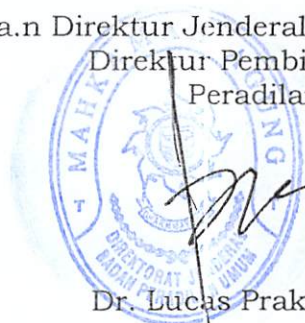
**JADWAL ACARA**  
**BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF**  
**SECARA ONLINE (DARING) DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

NO.	HARI / TANGGAL WAKTU	ACARA	KETERANGAN
1.	Rabu, 25 Januari 2023	<i>Berpakaian Dinas Harian</i>	KETERANGAN
	07.30 – 08.00 WIB	<i>Pre test</i>	Penyelenggara/Panitia
	08.00 - 08.30 WIB	Acara Pembukaan : a. Pembukaan b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dilanjutkan Hymne MA c. Pembacaan Do'a d. Laporan penyelenggara e. Sambutan, Pembukaan dan Pembinaan Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	Pembawa Acara Seluruh Hadirin  Panitia Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
	08.30 – 09.30 WIB	Perkembangan Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ) dalam penegakan hukum di Indonesia	- Wakil Direktur Sekolah kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia.
	09.30 – 11.00 WIB	Penerapan Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ) pada tahap penuntutan menurut Penuntut Umum	- Jaksa pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum.
2.	Kamis, 26 Januari 2023	<i>Berpakaian Batik</i>	KETERANGAN
	07.30 – 08.00 WIB	Presensi peserta melalui <i>link</i>	Penyelenggara/Panitia
	08.00 – 09.30 WIB	Penerapan Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ) dalam tahap penyelidikan menurut perspektif Kepolisian.	- Kepolisian Republik Indonesia
	09.30 -11.00 WIB	Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ) pada Peradilan Umum	- Wakil Ketua Tinggi PT. Pekanbaru.

3.	Jum'at, 27 Januari 2023	<i>Berpakaian Dinas Harian</i>	KETERANGAN
	07.30 – 08.00 WIB	Presensi peserta melalui <i>link</i>	Penyelenggara/Panitia
	08.00 – 10.00 WIB	Praktek (Diskusi Penal) Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ) pada Peradilan Umum  <b>Post test</b>	- Wakil Ketua Tinggi PT. Pekanbaru. - Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum
	10.00 WIB – Selesai	Acara Penutupan: a. Pembukaan b. Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri c. Sambutan dan Penutupan Bapak Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum d. Doa	Pembawa Acara Peserta Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

Jakarta, 20 Januari 2023

a.n Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  
 Direktur Pembinaan Tenaga Teknis  
 Peradilan Umum



Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.